

Dampak Kebijakan Subsidi BBM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Salsabilla Putri Lisari *¹

Mellyana Candra ²

Nursyidah ³

Arniya ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji.

*e-mail: sputrilisari@student.umrah.ac.id, mellyana1001@gmail.com,
nursyidah@student.umrah.ac.id, arniya@student.umrah.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, laporan resmi pemerintah, serta studi dan survei yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Semua data yang telah dikumpulkan akan dikaji dan dianalisis, kemudian disampaikan dalam bentuk naratif. Penelitian ini akan memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan dampak yang dapat muncul, mulai dari inflasi, daya beli masyarakat, hingga efek domino terhadap sektor-sektor utama seperti transportasi dan UMKM. Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan awal bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan BBM yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan subsidi harus dirancang secara tepat sasaran dengan perlindungan sosial yang memadai agar dapat menyeimbangkan kebutuhan fiskal pemerintah serta kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: Prediksi Kebijakan Publik, Subsidi BBM, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, inflasi

Abstract

This study aims to analyze the impact of fuel subsidy policies on economic growth and public welfare in Indonesia. The method used is a literature study with a descriptive analysis approach. The data used are secondary data obtained from various reliable sources, such as the Central Statistics Agency (BPS), Ministry of Finance, Bank Indonesia, official government reports, and relevant studies and surveys that have been conducted previously. All data that has been collected will be reviewed and analyzed, then presented in narrative form. This study will project the possible impacts that may arise, ranging from inflation, people's purchasing power, to the domino effect on key sectors such as transportation and MSMEs. This study is expected to provide initial input for the government and stakeholders in designing more adaptive and sustainable fuel policies. Therefore, subsidy policies must be designed in a targeted manner with adequate social protection in order to balance the government's fiscal needs and public welfare.

Keywords: Public Policy Prediction, Economic Simulation, Fuel Price Increase, Socio-Economic Impact

PENDAHULUAN

Subsidi telah menjadi instrumen kebijakan fiskal yang banyak diperbincangkan sejak dahulu, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satu komponen penting dalam subsidi yang ditanggung oleh pemerintah Republik Indonesia adalah bahan bakar minyak, yang merupakan kebutuhan pokok manusia dan juga berfungsi sebagai indikator makroekonomi. Fluktuasi harga bahan bakar minyak, yang dipengaruhi oleh pergerakan ekonomi dunia dan ketegangan politik global, menjadikan perubahan kebijakan subsidi sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Hingga saat ini, sejumlah studi telah mengeksplorasi dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi, kemiskinan, dan berbagai sektor ekonomi. Namun, masih terdapat kekurangan penelitian yang mengkaji dampak jangka panjang dari penerapan kebijakan subsidi BBM secara

menyeluruh.

Subsidi merupakan salah satu isu kebijakan publik yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Di Indonesia, golongan yang tidak mampu berhak dan seharusnya menerima subsidi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur beberapa aspek kesejahteraan sosial. Namun, pertanyaannya adalah, apakah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan oleh pemerintah selama ini benar-benar dinikmati sepenuhnya oleh mereka yang berhak? Pertanyaan ini menjadi hal yang krusial dalam diskusi mengenai kebijakan subsidi BBM.

Pada awal pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM), tujuan utama adalah untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh BBM dengan harga terjangkau. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada stabilitas harga komoditas bahan pokok. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak golongan yang kurang mampu justru tidak merasakan manfaat signifikan dari subsidi ini, sementara sebagian besar subsidi BBM malah dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

Tantangan terkait subsidi BBM sangat bervariasi tergantung pada negara masing-masing. Negara dengan populasi besar dan ketergantungan tinggi terhadap sumber energi cenderung menanggung subsidi yang lebih besar. Dari berbagai indikator, Indonesia memiliki tingkat subsidi yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain, terutama jika melihat jumlah penduduknya. Selain itu, ketika ditinjau dari potensi defisit anggaran negara, Indonesia juga berada di peringkat teratas.

Di Indonesia, bahan bakar minyak (BBM) diperlakukan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan barang-barang lainnya. Proses penetapan harga BBM di negara ini melibatkan lebih banyak hal daripada sekadar faktor-faktor mendasar seperti aspek teknis dan bisnis. Ada juga beberapa pertimbangan lain yang berperan dalam menentukan harga BBM.

Beberapa di antaranya mencakup kondisi fiskal, kapasitas produksi dan konsumsi, serta arah dan target kebijakan pemerintah, selain daya beli masyarakat. Perkembangan kebijakan harga BBM dari waktu ke waktu secara tidak langsung mencerminkan kondisi berbagai aspek tersebut.

Saat ini, jenis bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia terdiri dari premium, solar, dan minyak tanah. Subsidi ini diberikan karena harga jual bahan bakar yang ditentukan oleh pemerintah lebih rendah daripada harga di pasar atau biaya dasar pengadaannya. Sasaran utama dari kebijakan subsidi bahan bakar ini adalah untuk menjamin akses bahan bakar bagi semua kelompok masyarakat.

Terdapat Beberapa masalah utama yang muncul dari kebijakan subsidi BBM meliputi:

Inefisiensi terjadi ketika banyak subsidi tidak sampai kepada pihak yang membutuhkannya, dengan data menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh rumah tangga. Hal ini menciptakan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran. Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi besar untuk subsidi BBM dalam APBN mengurangi alokasi untuk belanja produktif lainnya, seperti pembangunan infrastruktur. Kenaikan dalam biaya subsidi juga dapat memperburuk defisit anggaran dan meningkatkan kerentanan terhadap gejolak ekonomi. Dampak Lingkungan, meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi berkontribusi pada pencemaran dan emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini menghambat transisi ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Pentingnya subsidi BBM di Indonesia dimana untuk membantu menjaga harga bahan bakar agar tetap terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dan mendukung sektor vital ini seperti transportasi dan pertanian. Stabilitas Ekonomi, dengan adanya subsidi pemerintah berupaya mengurangi dampak fluktuasi harga minyak global yang dapat mempengaruhi suatu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan sosial, subsidi juga diharapkan dapat memberikan

manfaat langsung kepada masyarakat miskin, meskipun dalam praktiknya sering kali

tidak tepat sasaran.

Peran subsidi dalam pemerintahan sangat penting sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis subsidi yang diterapkan, antara lain: 1). Subsidi Penyesuaian Harga, Subsidi ini bertujuan untuk membantu masyarakat dengan menurunkan harga suatu produk di bawah harga pasar, sehingga dapat mendorong tingkat konsumsi. 2). Subsidi Tunai Langsung: Dengan bentuk subsidi ini, pemerintah memberikan uang tunai langsung kepada masyarakat, memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui berbagai jenis subsidi ini, diharapkan terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di tengah masyarakat.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk jurnal, artikel, berita, buku, dan media literasi lainnya. Penelitian ini menerapkan studi literatur dengan metode analisis deskriptif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dampak penurunan subsidi

bahan bakar minyak (BBM) terhadap sektor ekonomi dan wilayah regional, sekaligus memahami perspektif masyarakat terkait kebijakan tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari berbagai sumber terpercaya, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, laporan pemerintah, serta studi dan survei yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Seluruh data yang telah dikumpulkan akan ditinjau dan dianalisis, lalu disajikan dalam bentuk naratif.

HASIL dan PEMBAHASAN

Bahan bakar minyak (BBM) memiliki peranan krusial sebagai modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, harga BBM menjadi lebih mudah dijangkau, yang membantu perekonomian tumbuh dengan cepat.

Bahan bakar minyak (BBM) adalah barang penting yang mendukung hampir seluruh bidang ekonomi di Indonesia, mulai dari transportasi, sektor pabrik, sampai penyediaan listrik. Ketergantungan yang besar terhadap BBM membuat kestabilan harga energi ini sangat penting untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan lancar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan subsidi BBM agar harga tetap dalam jangkauan, sehingga dapat mengurangi biaya hidup dan mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya untuk kelompok dengan pendapatan rendah.

Saat ini, harga BBM jenis Pertalite yang dihasilkan oleh Pertamina adalah Rp 7.650 per liter untuk RON 89-90. Sementara itu, bensin dengan spesifikasi serupa dari Vivo (Swiss) dan

BP AKR (hasil kolaborasi antara British Petroleum dan AKR Corporindo) memiliki harga yang masing-masing adalah Rp 9.290 per liter dan Rp 14.300 per liter. Perbedaan harga antara bahan bakar yang mendapatkan subsidi dan yang tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengatur keuangan mereka, serta mendukung kestabilan inflasi.

Namun, jika subsidi BBM dihapus, konsekuensinya bisa sangat signifikan. Kenaikan harga bensin akan berdampak pada harga bahan pokok yang semakin mahal, ongkos transportasi yang melonjak, serta penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan inflasi meningkat dan berdampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, bahkan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Di sisi lain, harga minyak global yang sering berubah-ubah menjadi tantangan tersendiri. Berbagai faktor, seperti ketegangan geopolitik di negara-negara penghasil minyak seperti Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Venezuela, dan Rusia, kerap berdampak pada harga. Saat ini, di tengah konflik yang masih berlangsung, seperti perang antara Rusia dan Ukraina, permintaan terhadap BBM terus melonjak seiring dengan perkembangan industri, sektor transportasi, dan jumlah kendaraan bermotor.

Dengan pemberian subsidi bahan bakar minyak, diharapkan masyarakat bisa menggunakan sisa uang mereka untuk kebutuhan lain, seperti membeli bahan pangan,

kebutuhan sekolah, kegiatan rekreasi, dan lain-lain. Melalui kebijakan subsidi tersebut, pemerintah bertekad untuk menjaga kemampuan beli masyarakat, mempercepat pemulihan konsumsi rumah tangga, serta mendukung stabilitas ekonomi Indonesia.

Dampak Kebijakan Subsidi BBM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

➤ **Dampak Ekonomi**

1. Pertumbuhan Ekonomi Jangka Pendek vs. Jangka Panjang : Dalam jangka pendek, Pemberian subsidi bahan bakar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga harga energi pada tingkat rendah, sehingga mengakibatkan biaya produksi dan transportasi menjadi lebih terjangkau. Ini meningkatkan konsumsi dari rumah tangga serta investasi dari para pelaku bisnis. Namun, untuk jangka panjang, subsidi bahan bakar yang besar dapat membebani anggaran negara, mengurangi kapasitas fiskal untuk mendanai sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengeluaran subsidi yang tidak tepat juga dapat menghambat efisiensi ekonomi dan perkembangan inovasi dalam energi terbarukan.

2. Inflasi karena Kenaikan Biaya Barang dan Layanan : Penurunan atau penghilangan subsidi bahan bakar menyebabkan kenaikan harga BBM, yang secara langsung berdampak pada peningkatan ongkos transportasi dan produksi. Dampak yang berantai ini memacu lonjakan harga barang dan layanan (inflasi), mengurangi kemampuan beli masyarakat, dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

➤ **Dampak Sosial**

1). Perubahan Daya Beli Masyarakat: Kebijakan subsidi BBM memiliki dampak yang besar terhadap kapasitas daya beli masyarakat, terutama bagi individu dengan penghasilan rendah. Bantuan BBM berperan dalam mempertahankan daya beli masyarakat dengan mengendalikan tingkat inflasi. Jika bantuan ini diminimalkan atau dihapus, daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah, akan menurun karena biaya untuk kebutuhan pokok semakin meningkat sementara pendapatan tidak berubah.

2). Ketimpangan Sosial : Penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial. Kenaikan harga BBM yang diikuti oleh inflasi dapat menyebabkan masyarakat yang sudah dekat dengan garis kemiskinan terperosok lebih jauh. Di samping itu, lapisan tengah yang tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) juga akan terpengaruh, sebab mereka tidak termasuk dalam program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Jika subsidi tidak mengenai sasaran dengan benar, kelompok yang lebih mampu justru memperoleh lebih banyak keuntungan, sedangkan kelompok yang rentan tetap terbebani.

Subsidi BBM dapat menekan inflasi, menjaga belanja rumah tangga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Akan tetapi, dalam jangka waktu yang lebih panjang, subsidi yang besar dapat menurunkan efisiensi alokasi anggaran dan menghalangi kemajuan dalam pengembangan sumber energi alternatif. Subsidi untuk bahan bakar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga stabilitas harga energi dan kebutuhan sehari-hari. Namun, jika bantuan tersebut tidak dialokasikan secara tepat, kelompok yang lebih kaya justru akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penghapusan subsidi tanpa adanya kompensasi yang cukup dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan membatasi akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Dampak Kenaikan Harga BBM

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan berbagai efek yang luas dan penting bagi banyak sektor ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia serta kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari kenaikan harga BBM:

Dalam konteks ekonomi, bahan bakar minyak (BBM) adalah komponen penting dalam proses produksi dan distribusi barang. Ketika harga BBM mengalami kenaikan, biaya untuk produksi dan distribusi ikut meningkat, yang akhirnya akan dibebankan pada konsumen dalam

bentuk harga barang dan jasa yang lebih mahal, sehingga dapat menyebabkan inflasi secara umum.

Selain itu, sektor transportasi juga merasakan dampak signifikan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, karena biaya operasional untuk kendaraan, baik yang dimiliki secara pribadi maupun angkutan umum, semakin tinggi. Hal ini menyebabkan tarif angkutan umum naik, yang memberikan beban tambahan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang bergantung pada transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, sektor industri dan pertanian juga merasakan efeknya, mengingat BBM diperlukan sebagai bahan bakar mesin-mesin untuk produksi serta pengangkutan hasil pertanian. Kenaikan biaya di sektor ini membuat harga barang industri dan pertanian menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dampak sosial yang timbul akibat peningkatan harga BBM cukup serius, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Penurunan kemampuan membeli karena tingginya harga barang kebutuhan pokok dapat meningkatkan jumlah orang yang miskin dan memperburuk standar hidup mereka. Di samping

itu, dampak sosial dan politik juga harus diperhitungkan. Kenaikan harga bahan bakar sering kali menjadi pemicu protes dan demonstrasi dari masyarakat yang merasa terbebani, yang menciptakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan di bidang sosial dan politik.

Di satu sisi, pengurangan subsidi bahan bakar dianggap sebagai langkah bijak untuk memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengalihkan anggaran ke sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini sering kali menimbulkan lonjakan inflasi dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, terutama berdampak negatif pada masyarakat kelas menengah ke bawah yang paling rentan terhadap fluktuasi harga energi.

Secara keseluruhan, kenaikan harga BBM membawa dampak ekonomi yang rumit, memengaruhi inflasi, biaya transportasi, produksi di sektor industri dan pertanian, serta kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan terkait subsidi bahan bakar harus disusun dengan cermat agar dapat menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang paling terdampak.

Biasanya, penurunan subsidi BBM disertai dengan peningkatan harga bahan bakar di pasar.

Hal ini berpengaruh langsung terhadap biaya produksi dan distribusi barang serta jasa. Kenaikan harga barang pokok, bertambahnya biaya transportasi, dan penurunan daya beli masyarakat adalah beberapa dampak yang tidak dapat dihindari. Jika tidak ditangani dengan baik, inflasi yang tinggi bisa merusak kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Sektor industri yang bergantung pada bahan bakar juga akan merasakan kenaikan biaya operasional, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya saing produk lokal. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi fondasi perekonomian Indonesia, juga merasakan dampak besar akibat kenaikan harga bahan bakar dan bahan baku.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, dampak dari pengurangan subsidi sangat ditentukan oleh cara pemerintah mengelola uang yang sebelumnya digunakan untuk subsidi. Apabila dana itu dipindahkan ke sektor-sektor yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi terbarukan, maka efek buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dikurangi dalam jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek, daya beli masyarakat mungkin akan berkurang, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar efektif dalam melindungi kelompok yang terpengaruh. Oleh karena itu, bantuan sosial yang tepat dan kebijakan fiskal yang fleksibel sangat penting untuk menghindari efek negatif dari pengurangan subsidi BBM yang berlarut-larut.

KESIMPULAN

Kebijakan subsidi BBM di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas harga energi, mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, serta menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Namun, tingginya subsidi BBM juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti beban fiskal yang besar, ketidaktepatan dalam distribusi subsidi, dan menjadi penghalang bagi pengembangan sumber energi terbarukan. Pengurangan atau penghapusan subsidi BBM dapat berpotensi menyebabkan inflasi, kenaikan harga transportasi dan produksi, penurunan daya beli masyarakat, serta peningkatan angka kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi yang tepat. Oleh karena itu, pengelolaan subsidi BBM perlu dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang paling berdampak.

SARAN

1). Pemerintah sebaiknya perlu merancang kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, misalnya dengan memberikan bantuan tunai langsung kepada kelompok-kelompok yang rentan, agar dukungan subsidi dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. 2). Dana yang dihasilkan dari pengurangan subsidi BBM sebaiknya dialihkan dalam sektor sektor seperti infrastruktur, pendidikan, ataupun kesehatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 3). Perlu dilakukannya Sosialisasi dan edukasi publik kepada masyarakat mengenai manfaat reformasi subsidi harus perlu ditingkatkan agar orang-orang memahami tujuan dari kebijakan ini dan mengurangi resistensi sosial. 4). Pemerintah perlu mengembangkan program perlindungan sosial yang tepat guna untuk menghadapi dampak negatif dari kenaikan harga BBM bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 5). Kebijakan subsidi BBM harus diintegrasikan dengan kebijakan fiskal yang fleksibel dan perlindungan sosial yang kuat dimana untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, terutama dimasa transisi pengurangan subsidi tersebut. 6). Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam distribusi subsidi agar manfaatnya benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berhak serta juga dengan mengurangi penyalahgunaan dan ketimpangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvina Veronica, Moneyzar Usman, Journal on Education, Dampak Perubahan Harga Subsidi (BBM) terhadap Pendapatan Nelayan (Studi Kasus: Dusun Kapuran, Kota Agung, Tanggamus), Volume 06, No. 01, September–Desember 2023, hlm. 8835–8841 Universitas Lampung.
- Veronica, A., & Usman, M. (2023). Dampak Perubahan Harga Subsidi (BBM) terhadap Pendapatan Nelayan (Studi Kasus: Dusun Kapuran, Kota Agung, Tanggamus). *Journal on Education*, 6(1), 8835-8841. E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365. Retrieved from Muallif. (2024, 29 Juni). Harga BBM Naik Turun: Analisis Dampak, Kebijakan Subsidi, dan Pro Kontra di Indonesia. [Artikel].
- [Pemerintah Indonesia]. (2022, 24 Agustus). Pentingnya Subsidi BBM dan Upaya Pemerintah Menanggungnya: APBN 2022 untuk subsidi energi mencapai Rp 502,4 triliun. [Artikel berita].
- Abidin, M. Zainul. (2016). Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 261. <https://doi.org/10.31078/jk1024>
- Chintia Simbolon, Irma, Karolina Sidebang, Lusyana, Theofani Margaret, Natasia, Valencia Pangaribuan, Sheryl, & Kemala Dewi Lubi, Putri. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2519–2528. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1112>
- Fitriana, Rahayu. (2014). BAHAN BAKAR MINYAK. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.

- Handoko, Budiono Sri, & Susilo, Y. Sri. (2006). Dampak Ekonomi Pengurangan Subsidi BBM. *Jesp*, Vol. 07, pp. 1–14.
- Harmono, Wahyu. (2022). Dampak Kebijakan Pengalihan Subsidi Bbm Di Tengah Krisis Multinasional Terhadap Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(2), 327–333. <https://doi.org/10.55047/jekombital.v1i2.343>
- Kurniawati, Lestari. (2017). Dampak Penurunan Subsidi Bahan Bakar Minyak: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia. *Info Artha*, 1(2), 91–110. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i2.94>
- Pohan, Farida Romaito, & Al-Farizi, Chairul Wafa. (2023). Dampak Implementasi Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Sektor Transportasi. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(2), 92–100.
- Sampe, Stefanus. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(1), 43–49. <https://doi.org/10.35797/jab.13.1.43-49>
- Saragih, Juli Panglima. (2011). Dilema Kebijakan Subsidi Harga Bahan Bakar Minyak dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(2), 585–606. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/119/74>
- Soesanto, Edy, Komansilan, Thomas, & Salsabillah, Natasha. (2025). *Dinamika Harga BBM : Dampaknya Terhadap Ekonomi Nasional dan Daya Beli Masyarakat*. 165–174.
- Sri Handoko, Budiono, & Sri Susilo, Y. (2000). Dampak Penurunan Subsidi Bbm Terhadap Kinerja Sektor Regional: Pendekatan Model Keseimbangan Umum Terapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(1), 14–24.
- Tsani Annisa. (2023). *Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Surabaya*.
- Veronica, Alvina, & Usman, Moneyzar. (2023). Dampak Perubahan Harga Subsidi (BBM) terhadap Pendapatan Nelayan (Studi Kasus: Dusun Kapuran, Kota Agung, Tanggamus). *Journal on Education*, 6(1), 8835–8841.
- AhmadFaqih. (2025). Subsidi BBM Dihapus pada 2027, Apa Saja Dampaknya?
- AsepSuryahadi, AsriYusrina, RidhoAlizzati. (2022). Mengestimasi Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan: Bukti Dari Pengurangan Subsidi BBM di Indonesia.
- INFONASIONAL. (2022). Pentingnya Subsidi BBM Dan Upaya Pemerintah Menanggungnya.
- Komaidinotonegoro. (2023). KONSUMSI BBM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA.
- Layla. (2025). Peran BBM Dalam Perekonomian Indonesia.
- MariaElena. (2023). Harga BBM Biang Kerok Inflasi Indonesia 2022, Tertinggi Sejak 2014.
- Muallif. (2024). Harga BBM Naik Turun: Analisis Dampak, Kebijakan Subsidi, Dan Pro Kontra di Indonesia.
- TegarTriWibowo. (2024). Kebijakan Fiskal Subsidi BBM Untuk Stabilisasi Harga dan Tantangan Yang Dihadapi.